

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran tenaga kerja sangat vital dalam pembangunan ekonomi karena menjadi penggerak utama kegiatan produksi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan, sekaligus menjaga keseimbangan sosial. Dalam pandangan makroekonomi, kualitas sumber daya manusia menentukan kemampuan suatu negara dalam menciptakan output dan nilai tambah bagi perekonomiannya. Ketika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi menyediakan lapangan kerja, timbul permasalahan struktural seperti meningkatnya pengangguran dan ketimpangan di pasar tenaga kerja (Dwika & Anandari, 2025). Ketidakseimbangan ini tidak hanya menurunkan produktivitas nasional, tetapi juga menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, arah kebijakan pertumbuhan ekonomi perlu difokuskan pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan agar mampu memperluas kesempatan kerja setiap tahunnya (Basuki, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan dinamika yang cenderung berfluktuasi akibat perubahan struktur ekonomi nasional dan tekanan eksternal yang signifikan, terutama pandemi COVID-19. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,23% pada 2019 melonjak menjadi 7,07% pada 2020 seiring melemahnya aktivitas ekonomi. Pada masa

pemulihan, TPT berangsur turun hingga mencapai 4,91% pada 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan pasar kerja. Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja masih banyak bertumpu pada sektor informal dengan produktivitas yang rendah. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi sektor padat karya, terutama industri mikro dan kecil yang selama ini menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja di daerah.



Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 memperlihatkan dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional yang sangat dipengaruhi oleh guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Terjadi lonjakan pengangguran pada awal periode krisis yang kemudian diikuti oleh tren penurunan secara bertahap seiring dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Meskipun demikian, penurunan TPT pascapandemi belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan kualitas pasar kerja, karena penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal

dan berproduktivitas rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan indikator pengangguran secara agregat belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi struktural pasar tenaga kerja yang berkelanjutan.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2019–2024 menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan dinamika ketenagakerjaan. Dampak pandemi menyebabkan perekonomian nasional berkontraksi sebesar -2,07% pada tahun 2020 akibat pembatasan aktivitas produksi dan konsumsi. Setelah fase tersebut, proses pemulihan mendorong pertumbuhan ekonomi kembali meningkat hingga mencapai 5,03% pada tahun 2024 (BPS, 2025). Namun, laju pertumbuhan ini tidak sepenuhnya diikuti oleh penurunan pengangguran yang seimbang. Kondisi tersebut mencerminkan pola pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja secara luas. Oleh sebab itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin peningkatan penyerapan tenaga kerja tanpa dukungan struktur ekonomi yang inklusif.

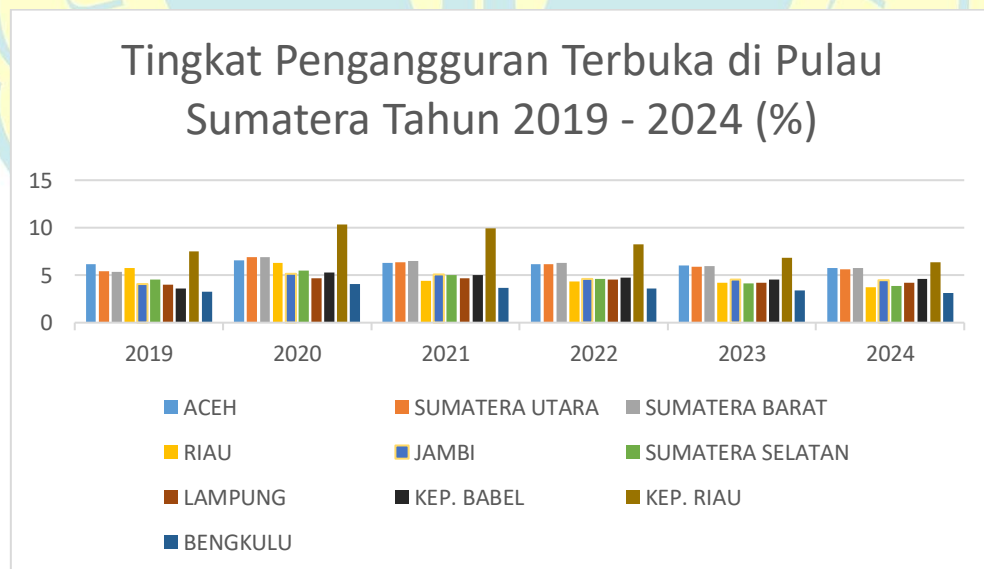
Dalam konteks perekonomian nasional, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) memegang peran penting sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi, ekspansi dunia usaha, dan penguatan basis industri nasional. Berdasarkan laporan BKPM (2024), realisasi investasi menunjukkan tren pertumbuhan signifikan, meningkat dari Rp 809 triliun pada 2019 menjadi Rp 1.714 triliun pada 2024, mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Secara teori, lonjakan investasi ini diharapkan

mampu menciptakan efek pengganda yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja (Ababio, 2022). Namun, distribusi dampaknya belum merata karena sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik, terutama Pulau Jawa. Selain itu, dominasi investasi di sektor-sektor padat modal menyebabkan keterbatasan daya serap tenaga kerja, sehingga dibutuhkan kebijakan afirmatif untuk mengarahkan investasi ke wilayah dan sektor yang lebih padat karya serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan regional (Muryani et al., 2021).

Secara umum, dinamika pasar tenaga kerja di negara berkembang, termasuk Indonesia, dipengaruhi oleh perubahan struktur industri global dan percepatan digitalisasi yang mendorong pergeseran kebutuhan tenaga kerja dari sektor konvensional ke sektor berbasis teknologi dan padat modal (Andabayeva et al., 2024). Transformasi ini memang berpotensi meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, namun tanpa kebijakan yang inklusif dapat mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja berpendidikan rendah. Oleh karena itu, negara berkembang perlu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesempatan kerja, karena fokus investasi yang berlebihan pada sektor padat modal berisiko memperlebar kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks ini, pengembangan industri mikro dan kecil menjadi kunci untuk menjaga penyerapan tenaga kerja sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi (Verico et al., 2024).

Pulau Sumatera menempati posisi penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi pusat kegiatan berbasis sumber daya alam seperti perkebunan,

pertambangan, dan kehutanan, sekaligus berperan sebagai gerbang perdagangan internasional di bagian barat nusantara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wilayah ini menyumbang sekitar 22% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menandakan kontribusi ekonomi yang signifikan di luar Pulau Jawa. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diiringi pemerataan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja yang memadai karena struktur ekonominya masih bergantung pada sektor primer yang padat modal dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas (Hilmawan & Clark, 2019). Selain itu, ketimpangan pembangunan antarprovinsi serta minimnya pengembangan industri hilir dan sektor jasa modern memperparah persoalan pengangguran di wilayah ini. Oleh karena itu, potensi ekonomi Sumatera belum sepenuhnya terkonversi menjadi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Nasution & Harahap, 2023).



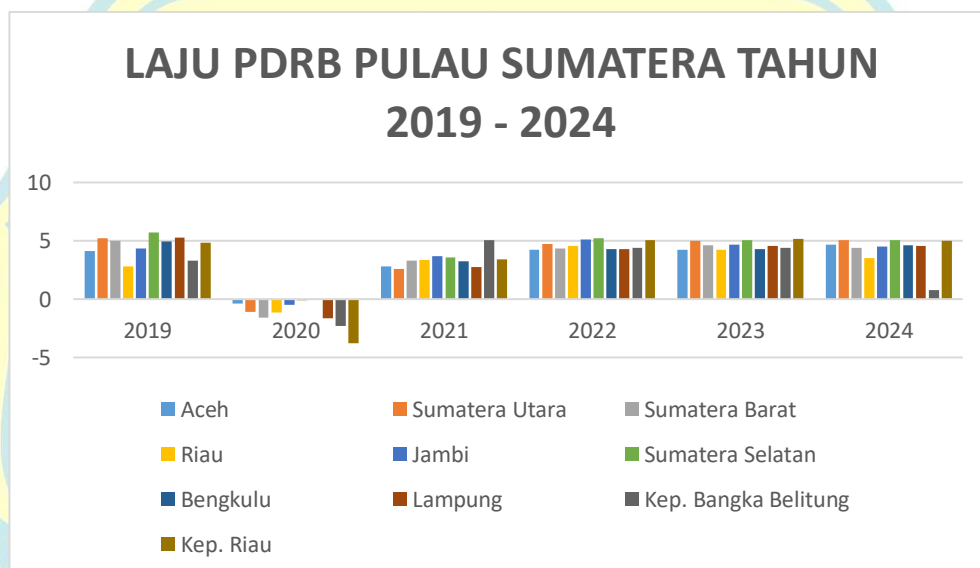
Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Pulau Sumatera Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Sumatera periode 2019–2024 menunjukkan bahwa pemulihan pasar kerja pascapandemi belum sepenuhnya kembali ke kondisi pra-COVID, yang tercermin dari masih lebih tingginya TPT pada tahun 2024 dibandingkan 2019 di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara yang masih lebih tinggi dari 5,39 persen menjadi 5,60 persen, Sumatera Barat dari 5,38 persen menjadi 5,75 persen, Jambi dari 4,06 persen menjadi 4,48 persen, Lampung dari 4,03 persen menjadi 4,19 persen, serta Kepulauan Bangka Belitung yang naik dari 3,58 persen menjadi 4,63 persen. Sementara itu, provinsi lain seperti Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau justru mencatat TPT tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi, sehingga kondisi ini mengindikasikan masih adanya permasalahan struktural ketenagakerjaan di sejumlah wilayah yang memerlukan kebijakan lebih terarah dan sesuai karakteristik daerah.

Di berbagai provinsi di Pulau Sumatera masih tampak kesenjangan yang cukup signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi dan kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi aktivitas ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja secara luas dan berkelanjutan. Kenaikan produksi dan nilai tambah regional lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang cenderung padat modal, berteknologi relatif tinggi, serta memiliki daya serap tenaga kerja yang terbatas (Haider et al., 2023). Akibatnya,

pertumbuhan ekonomi yang tercatat tidak secara proporsional diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran, sehingga mencerminkan fenomena *jobless growth* di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, keterkaitan ideal antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja di Pulau Sumatera masih belum sepenuhnya terwujud dan memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja (Nurrohman & Arifin, 2020).



Gambar 1. 3 Laju PDRB Sumatera Tahun 2019-2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera yang dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi pada masa pandemi dan pemulihan yang berlangsung secara bertahap. Meskipun mayoritas provinsi kembali mencatat pertumbuhan positif pada periode pascapandemi, laju pemulihan tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera belum sepenuhnya merata dan belum seluruhnya mampu

mendorong penciptaan lapangan kerja secara optimal, terutama di wilayah yang masih bergantung pada sektor primer dan padat modal.

Investasi akumulatif turut memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Pulau Sumatera karena berperan dalam memperluas kapasitas produksi pada berbagai skala usaha. Realisasi investasi meningkat signifikan dari Rp 150.561 triliun pada 2019 menjadi Rp 329.787 triliun pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Sumatera menjadi pulau kedua dengan nilai realisasi investasi terbesar di Indonesia yang menandakan menguatnya aktivitas ekonomi domestik. Namun, dampaknya terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka berbeda antarprovinsi karena dipengaruhi oleh sektor tujuan investasi dan karakteristik industrinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya nilai investasi tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penciptaan lapangan kerja (Novitasari, 2025).

Tabel 1. 1 Realisasi Investasi di Sumatera Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	5.550	8.984	10.821	6.317	12.645	9.537
Sumatera Utara	25.113	32.369	26.81	42.306	39.458	49.822
Sumatera Barat	5.247	4.933	5.145	3.978	6.315	9.799
Riau	40.902	49.792	52.556	83.828	79.158	89.941
Jambi	5.209	3.905	6.934	9.464	9.621	11.666
Sumatera Selatan	27.328	38.279	34.338	41.712	47.98	72.991
Bengkulu	7.504	8.196	5.264	7.731	8.371	9.362
Lampung	4.622	14.369	13.006	9.485	10.965	9.808
Kep. Bangka Belitung	4.168	2.568	4.318	8.233	9.058	17.352
Kep. Riau	24.918	38.232	24.74	18.671	20.425	49.509

Sumber: Satudata Perdagangan Kemendag (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi investasi akumulatif di Pulau Sumatera mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam jangka

menengah, meskipun sempat berfluktuasi akibat tekanan ekonomi global dan pandemi. Namun, besarnya nilai investasi antarprovinsi menunjukkan ketimpangan yang cukup jelas, dengan konsentrasi realisasi investasi akumulatif pada wilayah tertentu yang memiliki infrastruktur dan basis industri yang lebih berkembang. Variasi sektor tujuan investasi menyebabkan dampak investasi terhadap penyerapan tenaga kerja tidak bersifat seragam, sehingga peningkatan investasi belum secara otomatis diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka di seluruh provinsi Sumatera.

Pulau Sumatera menempati posisi kedua secara nasional dalam jumlah industri mikro dan kecil (IMK) setelah Pulau Jawa, sehingga secara struktural memiliki potensi yang besar sebagai motor penggerak penciptaan kesempatan kerja dan penguatan basis ekonomi lokal. Namun demikian, dominasi jumlah unit usaha IMK tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan laju pemulihan ekonomi wilayah, terutama dalam aspek ketenagakerjaan yang masih menunjukkan kerentanan. Hal ini tercermin dari masih relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka di sejumlah provinsi di Sumatera pada tahun 2024 yang bahkan melampaui kondisi sebelum pandemi pada tahun 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara besarnya skala IMK secara kuantitatif dan efektivitasnya dalam menyediakan lapangan kerja yang stabil, produktif, dan berkelanjutan (Alon & Lattemann, 2024). Dengan demikian, keberadaan IMK dalam jumlah besar tidak secara otomatis berimplikasi pada penurunan pengangguran apabila tidak disertai dengan peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas manajemen usaha, akses terhadap pembiayaan

dan teknologi, serta penguatan daya saing dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif (Melinda et al., 2025).

**Tabel 1. 2 Jumlah Industri Mikro dan Kecil di Pulau Sumatera
Tahun 2019-2024 (Unit)**

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	106.918	103.300	113.292	108.498	110.526	108.507
Sumatera Utara	127.152	120.163	132.382	120.914	126.907	123.911
Sumatera Barat	100.712	94.392	96.633	87.884	88.221	88.053
Riau	59.837	50.702	45.795	46.486	62.363	54.425
Jambi	28.159	26.085	29.384	32.995	34.534	31.268
Sumatera Selatan	80.307	75.569	79.115	74.056	77.216	77.228
Bengkulu	21.667	20.433	20.856	18.789	26.531	21.655
Lampung	95.041	88.526	84.024	84.533	81.255	88.069
Kep. Bangka Belitung	22.799	21.557	19.152	19.179	16.262	17.721
Kep. Riau	17.031	13.779	18.025	17.039	26.267	20.444

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 Jumlah industri mikro dan kecil (IMK) di Pulau Sumatera selama 2019–2024 menunjukkan pola fluktuatif, dengan penurunan pada 2020 dan pemulihan yang belum sepenuhnya stabil hingga 2024. Beberapa provinsi utama seperti Sumatera Utara dan Aceh tetap mendominasi jumlah IMK, namun di sebagian wilayah jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi, menandakan pemulihan yang belum merata.

Pulau Sumatera dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai kontributor PDB terbesar kedua setelah Pulau Jawa, namun masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang bersifat struktural. Meskipun realisasi investasi akumulatif dan jumlah industri mikro dan kecil (IMK) di wilayah ini tergolong tinggi, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum berlangsung merata antarprovinsi,

bahkan di beberapa wilayah masih lebih tinggi dibandingkan periode pra-pandemi. Dominasi sektor berbasis sumber daya alam yang cenderung padat modal menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja secara luas, sehingga mengindikasikan terjadinya *jobless growth*. Dengan karakteristik ekonomi yang heterogen antarprovinsi, Pulau Sumatera menjadi wilayah yang relevan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan IMK terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menetapkan pertumbuhan ekonomi regional, investasi, serta jumlah industri mikro dan kecil sebagai variabel independen karena ketiganya memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat pengangguran terbuka, baik berdasarkan landasan teori maupun hasil penelitian empiris. Pertumbuhan ekonomi regional mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi memperluas kesempatan kerja, sedangkan investasi berperan dalam mendorong pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, industri mikro dan kecil merupakan sektor padat karya yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut dipilih untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera selama periode 2019–2024.

Kajian terdahulu banyak menyoroti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia, baik pada skala nasional maupun provinsi. Penelitian oleh Melinda et al. (2025) mengungkapkan bahwa

peningkatan investasi serta ekspansi sektor industri mikro berpengaruh positif terhadap peningkatan serapan tenaga kerja di kawasan Sumatera Bagian Selatan. Studi tersebut menegaskan bahwa investasi domestik yang diarahkan pada sektor padat karya dapat secara signifikan menekan angka pengangguran melalui peningkatan produktivitas. Lebih jauh, pertumbuhan industri kecil terbukti menimbulkan efek pengganda bagi ekonomi lokal karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun demikian, penelitian ini belum menjelaskan secara mendalam bagaimana investasi berinteraksi dengan faktor makroekonomi lain seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Temuan serupa disampaikan oleh Ye (2025) yang meneliti pengaruh variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Sumatera. Melalui analisis data panel antarprovinsi, penelitian tersebut menemukan hubungan negatif antara peningkatan PDRB dan TPT, menandakan adanya efek pemerataan (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi terhadap lapangan kerja. Namun, penelitian ini belum menguraikan secara spesifik kontribusi industri mikro dan kecil (IMK) dalam memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal. Padahal, IMK berperan vital sebagai “katup pengaman ekonomi” ketika sektor formal mengalami kontraksi, terutama pasca-COVID-19. Karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut yang menempatkan IMK sebagai variabel sentral dalam hubungan antara faktor makroekonomi dan ketenagakerjaan di Sumatera.

Selanjutnya, Silaen et al. (2025) menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, dengan peningkatan jumlah unit usaha kecil berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut memperlihatkan peran strategis sektor mikro dan kecil dalam menopang perekonomian masyarakat serta mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah. Akan tetapi, riset ini belum secara langsung mengaitkan hubungan antara IMK, investasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sehingga pemahaman mengenai keterkaitan struktural antarvariabel tersebut masih terbatas. Dengan demikian, penelitian lanjutan yang mengintegrasikan ketiga aspek ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika ketenagakerjaan di Pulau Sumatera.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melinda et al. (2025), Ye (2025), dan Silaen et al. (2025) dapat ditemukan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup menonjol. Sebagian besar studi hanya meneliti hubungan dua variabel secara terpisah, seperti investasi dan ketenagakerjaan, tanpa memperhitungkan kontribusi IMK secara menyeluruh. Di samping itu, penelitian yang berfokus pada konteks Pulau Sumatera masih terbatas, padahal wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan pulau lain seperti Jawa yang lebih maju dalam industrialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui pendekatan kuantitatif yang menelaah pengaruh ketiga variabel utama terhadap dinamika pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.

Berdasarkan research gap yang telah diidentifikasi, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan variabel pertumbuhan ekonomi regional, investasi kumulatif yang mencakup PMDN dan PMA, serta jumlah industri mikro dan kecil untuk menganalisis tingkat pengangguran terbuka menggunakan regresi data panel pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019–2024. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan PMDN atau PMA secara terpisah, penelitian ini mengukur investasi secara kumulatif sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, penerapan Fixed Effect Model (FEM) memungkinkan perbedaan karakteristik antarprovinsi diperhitungkan dalam analisis, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan representatif.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena pengangguran masih menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera. Hasilnya diharapkan memberikan bukti empiris untuk mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan investasi yang lebih efektif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam RPJMN 2020–2024, pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di bawah 5%, sehingga pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran menjadi krusial. Kajian ini relevan karena menyoroti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industri mikro serta kecil sebagai faktor utama penyerap tenaga kerja di Sumatera. Temuan penelitian diharapkan dapat

memberikan arah kebijakan strategis untuk menekan angka pengangguran secara berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis akan menyajikan penelitian ini dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL, INVESTASI, DAN JUMLAH INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PULAU SUMATERA TAHUN 2019 - 2024.” Penelitian difokuskan pada periode 2019–2024 untuk menangkap dinamika pasar tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2024?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2024?
3. Apakah jumlah industri skala mikro dan kecil berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2024.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2024.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah industri mikro dan kecil terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera tahun 2019 – 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan berbagai kebermanfaatan, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi ketenagakerjaan dan pembangunan regional dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perkembangan industri mikro dan kecil terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, struktur industri lokal, dan kemampuan wilayah dalam menciptakan lapangan kerja, serta dapat

menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, investasi, dan pemberdayaan industri mikro dan kecil (IMK) yang lebih tepat sasaran guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera.
- b. Bagi instansi yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan industri, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal serta mendorong program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan sektor industri mikro dan kecil di wilayah Sumatera.
- c. Bagi pelaku usaha dan investor, penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan struktur industri daerah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan strategis dalam menentukan lokasi dan sektor investasi yang potensial.
- d. Bagi akademisi dan peneliti di bidang ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah untuk memperluas kajian tentang pengaruh investasi dan pengembangan IMK terhadap pengangguran terbuka, khususnya dalam konteks pembangunan regional di Indonesia.